

meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sehingga kemudian dengan sadar atau tidak, aspek gender tersebut membawa konsekuensi logis bila ternyata berperan secara tidak adil.

Kata gender dan seks atau jenis kelamin harus dibedakan. Jenis kelamin menunjuk pada pembagian dua kelamin yang berbeda dan merupakan penentuan secara biologis. Jenis kelamin secara permanen tidak akan berubah. Adapun gender adalah sesuatu yang sifatnya melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Maka gender bukanlah suatu *given* atau kodrat yang tidak bisa dipertukarkan, tetapi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Konstruksi gender bukan melihat manusia dari sisi biologis tetapi lebih kepada konstruksi dari struktur sosial dan budaya. Secara umum, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi social budaya, sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi biologi.

Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan

Perspektif gender adalah sudut pandang yang dipakai ketika melakukan penelitian yang berfungsi untuk memahami gejala social budaya. Gender dijadikan perspektif dengan asumsi bahwa didalam masyarakat ada perbedaan menurut jenis kelamin. Gender sesungguhnya adalah hasil atau akibat dari perbedaan atas dasar jenis kelamin tersebut (*sexual differentiation*), ada perbedaan dalam kehidupan social, ada laki-laki dan perempuan, ada domestic dan public, dan sebagainya.

Adanya ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, memunculkan istilah bias gender. Bias gender artinya adanya penyimpangan atau kecenderungan diskriminasi tertentu (ketidakadilan gender). Bias gender yang lebih mengemuka di masyarakat khususnya di Indonesia terjadi pada kalangan perempuan. Artinya posisi perempuan Indonesia saat ini masih sangat lemah dan terdiskriminasikan. Bias gender dalam pendidikan tampak jelas dalam pengelompokan gender ke dalam jurusan, bidang kejuruan atau bidang-bidang keahlian yang berbeda-beda menurut jenis kelamin. Gejala ini bisa berdampak buruk dalam

Simbol dalam kehidupan sangat memengaruhi keberadaan gender. Laki-laki diidentikkan dengan kejantanan (*masculinity*), sedangkan perempuan diidentikkan dengan kewanitaan (*femininity*). Persepsi yang dilekatkan pada perempuan adalah sebagai makhluk lemah lembut, cantik, manja, penakut, mudah terbawa emosi dan penuh kasih sayang.

terhadap teori ini sangat diperlukan agar dapat ditarik kesimpulan yang benar.

Dengan demikian dapat ditarik garis besar, sebenarnya aliran-aliran feminisme muncul karena adanya ketimpangan gender atau *gender gap* yang berkaitan dengan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender (*gender equality*) dan keadilan gender (*gender equity*), maka harus ada relasi gender yang harmonis antara laki-laki dan perempuan .

4. Pendidikan Islam berprespektif Gender

Pendidikan Islam berprespektif gender adalah untuk memberikan dan menjamin terpenuhinya hak pendidikan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ia merupakan proses transformasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam berlandaskan al-Qur'an dan Hadis Nabi untuk mengantarkan terbentuknya kepribadian Islami dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan pengetahuan laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial lingkungannya, menuju pendidikan berkesetaraan gender agar keduanya memperoleh manfaat yang sama dari hasil pendidikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan demikian pendidikan islam berprespektif gender merupakan tujuan untuk menghantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan

tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik.⁴² Pendidikan Islam diharapkan mampu merealisasikan tujuan hidup manusia sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam, yaitu beribadah kepada Allah.⁴³ Tujuan mulia pendidikan Islam tersebut sama sekali bebas dari bias gender akibat perbedaan jenis kelamin. Adapun tujuan khusus pendidikan Islam responsif gender dirumuskan secara spesifik berupa harapan-harapan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan.

Konsep pendidikan Islam umum bersumber dari al-Quran dan As-Sunnah, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, dan wawasan pemikiran Islam.⁴⁴ Dengan demikian pendidikan Islam berprespektif gender diimplementasikan berdasarkan pada *pertama*, ajaran al-qur'an dan as-sunnah yang meliputi penghargaan Islam terhadap akal, keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu, serta *kedua* nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang selaras atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam atas dasar manfaat, dan menghindari kendala-kendala yang dihadapi oleh laki-laki maupun perempuan, sehingga kedua jenis kelamin sama-sama memperoleh hasil belajar yang baik; *ketiga*, warisan pemikiran Islam yang berpotensi mendorong terwujudnya kesetaraan gender sebagai bahan pengembangan pendidikan Islam yang bermuara pada prinsip dasar Islam sebagai agama yang ramah terhadap perbedaan gender dan perbedaan-perbedaan lainnya.

⁴² Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Alpha, 2005), 30.

⁴³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 46.

⁴⁴ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1979), 7.

Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah “*self fulfilling prophecy*” terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.

- d. Dimensi akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki otoritas untuk memutuskan terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya antara lain: kurang tersedianya sekolah menengah di setiap kecamatan, jarak yang jauh dari tempat tinggal, beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat banyak anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.
- e. Dimensi proses pembelajaran adalah materi pendidikan seperti misalnya yang terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu mengatasnamakan laki-laki. Dalam buku-buku pelajaran seperti misalnya semua jabatan formal dalam buku seperti camat dan direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak dan mencuci. Faktor penyebabnya *stereotype gender*.
- f. Dimensi penguasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memajukan peranannya dalam masyarakat. Faktor penyebabnya pemanfaatan yang minim, peran yang tidak terserap oleh masyarakat dan masih berpegang

- b. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan Nasional;
- c. Tujuan ke-3 MDGs: Meningkatkan persamaan gender dan Pemberdayaan perempuan;
- d. Surat Edaran Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri KPPPA No. 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- e. Peraturan Menteri Keuangan yang terbit setiap tahun tentang Pedoman Penalaahan RKA-KL (tahun 2012, 2013, dan 2014) untuk melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada level kegiatan;
- f. Peraturan Presiden No 18 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah Konflik dan PERMEN PP-PA no 6 tahun 2013 tentang Keluarga
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- h. Publik Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Madrasah
- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor

lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan *affirmative action* apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan;

2) Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.

Dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir. Analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut.

Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan sudah bisa dikatakan responsif gender atau bias gender atau bahkan buta gender, maka digunakan langkah-langkah praktis analisis berikut ini:

- 1) Menggambarkan atau memetakan kondisi laki-laki dan perempuan, anak perempuan dan laki-laki menurut kelompok yang berbeda (*situation*).
- 2) Menelaah dan melihat apa ada kebijakan yang tersedia yang mempertimbangkan gender (*policy*).

keluarga yang kurang mampu dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya; dan

- 5) Melakukan penyesuaian berbagai upaya dengan situasi dan permasalahan masing-masing daerah atau wilayah, serta dikoordinasikan bersama oleh seluruh *stakeholders*.

Dalam kaitan dengan isu mutu dan relevansi pendidikan, arah dan kebijakan yang diambil, antara lain:

- 1) Menyempurnakan kurikulum dan memperbaiki materi ajar agar lebih sensitif gender;
- 2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga memiliki pemahaman yang memadai mengenai masalah gender, bersikap sensitif, serta menerapkannya dalam proses pembelajaran.

Dalam kaitan dengan manajemen pendidikan, arah dan kebijakan yang diambil, antara lain:

- 1) Melakukan analisis terhadap kebijakan dan peraturan perundangan yang masih bias gender;
- 2) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pendidikan yang berwawasan gender;
- 3) Meningkatkan kapasitas institusi pengelola pendidikan yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, menyusun kebijakan, strategi dan program pendidikan berwawasan gender secara efektif dan efisien;

bahwa dalam pengaturan agenda prespektif gender dan tujuan kesetaraan gender dipandang sebagai pusat dari semua kegiatan dalam pengembangan kebijakan , penelitian, advokasi, dialog, undang-undang, alokasi sumber daya, perencanaan dan pemantauan program dan proyek dengan cara memastikan bahwa lembaga-lembaga, kebijakan dan program merespon kebutuhan dan kepentingan perempuan serta laki-laki lalu mendistribusikan manfaat secara adil antara perempuan dan laki-laki.

Pendekatan pemersatu atau peran adalah pendekatan yang paling sering digunakan oleh lembaga-lembaga internasional. Pendekatan ini berupaya untuk membangun isu-isu gender ke dalam kerangka kerja pembangunan dan intervensi yang ada karenanya memandang pengarusutamaan gender dari sudut pandang yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan ini, agenda pembangunan secara keseluruhan tidak mengalami perubahan dan disesuaikan untuk mencoba mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan wanita gender. Dengan demikian perempuan dimasukkan ke dalam banyak-banyak sektor dan programnya yang ada sebisa mungkin, namun prioritas sektor dan program tidak berubah hanya karena masalah gender.